

PROBLEM KEMISKINAN : ANALISIS SEBAB DAN JALAN KELUAR

Mardjoko Idris

Abstrak

Persoalan kemiskinan adalah persoalan kehidupan umat manusia, keberadaannya telah menjadi bagian dari takdir Tuhan. Namun manusia sendiri yang menentukan pada posisi mana ia berada. Kemiskinan sering disebabkan oleh faktor kultural dan struktural, oleh karenanya analisisnya pun hendaklah melalui pendekatan kultural dan struktural. salah satu cara mengatasi kemiskinan sebagai akibat dari krisis ekonomi adalah dengan menggunakan beberapa pendekatan, antara lain pendekatan sosial, agama dan kebijakan. Tulisan ini selain akan memaparkan tentang kemiskinan juga akan mencoba memahami sebab-sebab kemiskinan, dengan fokus pada *kemiskinan harta* dan adakah jaminan sosial di tengah-tengah kehidupan mereka

I. Pendahuluan

Tema ini diangkat dan diilhami oleh adanya fenomena yang memprihatinkan di kalangan masyarakat pedesaan, terutama yang menimpa pada masyarakat bawah. Dari sekian banyak fenomena tersebut antara lain pembangunan gedung bertingkat yang berada berbagai kota. Pembangunan tersebut hampir tak melibatkan pekerja yang note benanya adalah masyarakat pedesaan dan bawah. Pekerjaan bangunan gedung berlantai tersebut lebih mengandalkan pada padat teknologi dan bukan padat karya. Ada plus minusnya, tapi yang jelas dengan tidak melibatkan masyarakat lapis bawah berarti telah menutup lapangan pekerjaan bagi mereka. Dan itu juga berarti menjauhkan jaminan social dari mereka.

Makalah ini akan mencoba memahami sebab-sebab kemiskinan, dengan fokus pada *kemiskinan harta* dan adakah jaminan sosial di tengah-tengah kehidupan mereka. Secara berurutan akan dibicarakan (1)

Pengantar, (2) Definisi kemiskinan, (3) Sebab kemiskinan, kemudian dikemukakan, (4) Pemecahan masalah, yang meliputi (4.1) Jaminan sosial, (4.2) Konsep Islam Aplikatif, dan (4.3) Kebijakan ekonomi, yang terakhir adalah (5) Penutup.

II. Definisi Kemiskinan

Purwodarminto memberikan pengertian miskin atau kemiskinan dengan tidak berharta benda; serba kurang.¹ Peter Townsend dalam *The Concept of Poverty* mengemukakan konsep kemiskinan menjadi tiga macam, yaitu : kemiskinan absolut, kemiskinan relatif dan kemiskinan subyektif.²

Kemiskinan absolut biasanya diukur dan dirumuskan dengan membuat ukuran tertentu yang konkrit. Ukuran tersebut lazimnya berorientasi pada kebutuhan hidup dasar minimum anggota masyarakat : Seperti sandang, pangan dan papan. Karena ukuran ini dibuat terlebih dahulu, maka ukuran yang digunakan oleh negara yang satu akan berbeda dengan negara yang lain. Konsep kemiskinan semacam ini banyak mendapat kritikan, antara lain bagaimana mungkin membuat satu ukuran untuk semua masyarakat, padahal kebutuhan sandang, pangan dan papan di antara mereka berbeda. Belum lagi adanya pemikiran yang memasukkan kebutuhan dasar cultural seperti pendidikan, rekreasi, dan keamanan sebagai bagian dari kebutuhan dasar hidup.

Konsep kemiskinan relatif dirumuskan berdasarkan *the idea of relative standart*, yaitu dengan memperhatikan dimensi tempat dan waktu. Dasar asumsinya adalah kemiskinan di suatu daerah belum tentu kemiskinan di daerah lain, demikian juga kemiskinan di masa tertentu belum tentu disebut sebagai kemiskinan di masa yang lain. Konsep seperti ini biasanya diukur berdasarkan pada pertimbangan masyarakat tertentu, dengan berorientasi pada derajat kelayakan hidup. Konsep kemiskinan relatif ini juga mendapat kritikan. Antara lain karena sulitnya menentukan patret hidup yang layak itu. Apa yang dianggap layak di suatu masyarakat tertentu belum tentu dianggap layak di masyarakat lain. Demikian juga keadaan layak hari ini belum tentu dianggap layak di lain hari.

Sedang konsep kemiskinan subyektif dirumuskan berdasarkan perasaan kelompok miskin itu sendiri. Konsep yang ketiga ini tidak mengenal

¹ Purwodarminto , *Kamus Umum Bahasa Indonesia*, Pusat Pembinaan dan Pengembangan Bahasa Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, (Jakarta: Balai Pustaka, 1985), P. 652

² Peter Townsed, *The Concept of Poverty*, London Heinemann 1970 lewat tulisan Sunyoto Usman, *Pembangunan dan Pemberdayaan Masyarakat*, (Yogyakarta, Pustaka Pelajar, 2006), P.125

a fixed yardstick, juga tidak memperhitungkan *the idea of relative standart*. Kelompok masyarakat yang menurut ukuran kita berada di bawah kemiskinan, boleh jadi masyarakat tersebut tidak pernah menganggap diri mereka berada di dalam kemiskinan. Demikian juga sebaliknya, kita menganggap mereka tergolong mampu, namun mereka meletakkan diri mereka pada kelompok tidak mampu. Konsep ini dinilai oleh beberapa ahli sebagai konsep kemiskinan yang lebih tepat, serta mempermudah bagi pengambil kebijakan serta merumsukan cara atau strategi yang efektif untuk mencari jalan keluarnya.

Istilah kemiskinan selalu dilawankan dengan kaya, sebagaimana kata rakyat yang selalu dilawankan dengan penguasa. Kendati tidak disepakati, namun ada kesan bahwa kemiskinan identik dengan rakyat, sedang kaya identik dengan penguasa. Dalam pandangan Musa Asy'ari kata rakyat adalah abstrak, dan baru dapat difahami bila kata tersebut telah dikaitkan dengan berbagai aspek kehidupan, seperti ekonomi, politik, budaya dan agama.³ kata rakyat adalah abstrak, dan baru dapat difahami bila kata tersebut telah dikaitkan dengan berbagai aspek kehidupan, seperti ekonomi, politik, budaya dan agama.

Secara *ekonomi*, rakyat adalah sebuah istilah yang mapan untuk para pedagang kaki lima, petani yang tidak mempunyai tanah, tukang batu, bakul jamu, jual sate jalanan, pedagang sayur, pemulung, pengamen, tukang becak, kernet dan yang setingkat dengan itu. Para rakyat ini, tidak pernah menyentuh perbankan atau lembaga keuangan formal, bila mereka membutuhkan uang sebagai modal bekerja, mereka dapat berhubungan dengan para rentenir atau bank plecit.

Secara *politik*, rakyat adalah orang yang memperjuangkan kursi untuk orang lain, mereka selalu menjadi tangga buat mereka yang ingin menjadi wakil rakyat. Mereka berada di luar birokrasi formal pemerintahan, bukan camat, bukan bupati apalagi yang lebih tinggi. Mereka dapat mengubah nasib seseorang menjadi orang penting, namun dirinya sendiri tak pernah berubah.

Secara *kultural*, rakyat adalah mereka yang suka nonton pagelaran wayang semalam suntuk, suka pertunjukan kuda lumping, ludruk, atau ledek ketek. Rakyat adalah berpendidikan rendah, berbahasa ngoko atau kasar, jauh dari pusat kekuasaan atau kraton.

³ Musa Asy'ari, *Keluar dan Krisis Multi Dimensi*, (Yogyakarta, LESFI, 2001), P.50

Secara *keagamaan*, rakyat adalah masyarakat umum, dalam menjalankan ajaran agama selalu mendapatkan bimbingan dari ulama, ustadz, kyai atau pendeta hubungan antara rakyat dengan pemimpin agama sangat emosional dan primordial. Apa yang dikatakan sang kyai adalah suatu kebenaran, termasuk dalam persoalan memilih jodoh. Secara periodik, mereka selalu berziarah ke makan sang kyai yang telah meninggal untuk membacakan tahlil, surat yasin serta doa-doa keselatan.

III. Dimensi kemiskinan.

Ellis dalam bukunya *The Demensions of powerty* mengemukakan dua cara yang bisa digunakan untuk mendekati kemiskinan : melalui *cultural dan perspektifi structural* atau dikenal juga *perspektif situasional*.⁴ Dalam perspektf *cultural* kemiskinan didekati melalui tiga tingkatan analisis : individu, keluarga dan masyarakat. Pada tingkat individu kemiskinan biasanya ditandai dengan pribadi yang mempunyai sifat apatisme, fatalisme atau pasrah pada nasib, boros, ketergantungan pada orang lain dan inferior. Pada tingkat keluarga biasanya ditandai dengan jumlah keuarga yang banyak namu tidak dibarengi dengan pertumbuhan ekonomi yang layak. Pada tingkat masyarakat, kemiskinan ditandai dengan adanya sikap yang menganggap bahwa orang miskin itu objek yang harus digarap, bukan sebagai subyek yang perlu diberi peluang untuk berkembang.

Sedang kemiskinan menurut perspektif *structural* adalah masalah kemiskinan yang dilihat sebagai dampak dari suatu kebijakan yang lebih mengutamakan penggunaan produk teknologi modern dari pada padat karya warga masyarakat. Kebijakan yang lebih mengutamakan pemanfaatan teknologi modern ini memang telah melahirkan pertumbuhan ekonomi yang spektakuler, namun kurang memperhatikan pemerataan hasil pembangunan ke seluruh lapisan masyarakat. Dengan kata lain, kebijakan yang lebih mengutamakan pertumbuhan ekonomi dan mengabaikan pemerataan hasil ekonomi ini akan menjadikan yang kaya semakin kaya, dan yang miskin semakin miskin.

Bila sekarang ini, kita menganggap bahwa akar kemiskinan berkaitan dengan faktor kultural, maka startegi hendaklah disusun dengan tujuan meningkatkan etos kerja kelompok miskin, meningkatkan taraf pendidikan dengan harapan supaya mereka dapat berpikir ke arah masa depan yang

⁴ Ellis, *The Dimensions of Powerty*, dalam Sunyoto Usman, *Pembangunan dan Pemberdayaan Masyarakat*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2006), P. 127.

lebih baik, serta menata kembali institusi-institusi ekonomi yang ada menjadi institusi yang peka terhadap masyarakat miskin. Namun bila kita menganggap bahwa kemiskinan berkaitan dengan faktor struktural, maka strategi pembangunan hendaklah dirumuskan tidak saja pada kepentingan pertumbuhan, namun juga pada pemerataan hasil dan kesempatan.

Masalah lain yang erat hubungannya dengan kemiskinan adalah apa yang disebut dengan istilah *sindrom inertia* atau budaya lamban dan statis. Budaya lamban dan statis ini besar kemungkinannya sangat dipengaruhi oleh sumber daya manusia yang masih rendah. Pemerintah –sebatas kemampuannya- sebenarnya telah memberi perhatian terhadap pendidikan, namun sayangnya sekolah-sekolah dan perguruan tinggi yang ada belum terjangkau oleh masyarakat secara umum. Kenyataan berbicara, bahwa pendidikan dan mutu lulusan –hingga kini- masih menjadi milik keluarga mampu, padahal jumlah mereka tidak banyak. Sementara sebagian banyak masyarakat masih dalam posisi lamanya, yaitu pasrah dan tidak mempunyai kesempatan untuk mengembangka diri melalui jalur pendidikan tinggi. Kalau memang benar, bahwa kemiskinan berkaitan dengan pendidikan, maka banyak hal yang harus segera dipikirkan oleh para pakar pendidikan, antara lain : memberi kesempatan kepada semua lapisan masyarakat untuk menikmati pendidikan formal, meningkatkan mutu pendidikan dan mutu lulusan. Dengan lulusan yang berkualitas, diharapkan setiap lulusan dapat menciptakan lapangan kerja dan dapat mengisi kesempatan kerja.

IV. Jalan Keluar

Dalam membicarakan jalan keluar bagi persoalan kemiskinan ini, akan dimulai dengan bahasan jaminan sosial yang difahami sebagai konsep formal ILO (*International Labour Organisation*), kemudian bahasan tentang jaminan sosial dalam konsep budaya jawa, dilanjutkan dengan bahasan mengenai pemahaman Islam secara seimbang, dan yang terakhir adalah kebijakan yang tepat.

A. Jaminan Sosial konsep formal ILO.

Jaminan sosial sering difahami sebagai “jaminan bahwa masyarakat diberi perlindungan, melalui organisasi pemerintah, dari resiko-resiko tertentu”. Dalam Konvensi No. 102 Tahun 1952 jaminan sosial dirinci menjadi sembilan bidang L1) pelayan kesehatan, (2) orang-orang sakit, (3) orang-orang yang tidak bekerja, (4) orang-orang yang jompo, (5) kecelakaan

kerja, (6) keluarga, (7) ibu-ibu yang melahirkan, (8) orang-orang cacad, dan (9) janda serta anak-anak yatim piatu⁵.

Dalam pelaksanaannya, jaminan sosial yang disebut dalam jaminan sosial ILO, secara kenyataan bisa dilaksanakan di negara-negara yang telah maju, namun sulit sekali dilaksanakan di negara-negara berkembang. Dalam pelaksanaannya jaminan sosial ILO harus disesuaikan dengan kemampuan dan karakteristik negara-negara yang bersangkutan. Oleh karenanya, kadang jaminan sosial ini tidak diberikan sebagai rasa kemanusiaan, melainkan ditumpangi dengan kepentingan-kepentingan politis dari pihak-pihak tertentu. Seperti pelaksanaan jaminan sosial di Amerika Latin, jaminan sosial digunakan sebagai sarana untuk mencapai kepentingan-kepentingan tertentu yang bersifat politis dari para penguasa.

Di Indonesia –juga sebagai negara berkembang- jaminan sosial ILO diwujudkan dalam bentuk pensiun dan asuransi. Jaminan sosial yang diberikan oleh negara Indonesia ini masih sangat terbatas pada golongan tertentu : Pegawai Negeri, Militer, Polisi dan pekerja di industri-industri swasta saja. Sekarang bagaimana nasib orang miskin yang bekerja di sektor informal, baik di perkotaan maupun di pedesaan, terutama orang-orang miskin. Secara fakta, mereka justru semakin jauh dari jaminan sosial seperti yang telah dikonsepsikan oleh ILO.

Fenomena semakin banyaknya para pengamen, peminta-minta dengan cara yang berbeda-beda –di perkotaan- disadari atau tidak, menandai bahwa kehidupan di desa tidak lagi mampu memberi jaminan sosial bagi mereka, sekaligus sebagai trend pola hidup rakyat di negara berkembang, dan itu juga semakin menyulitkan mengatasi persoalan kemiskinan dan jaminan sosial di masyarakat lapis bawah. Dalam pandangan Musa Asy'ari⁶, kemiskinan –jika tidak segera diatasi- akan berdampak pada jatuhnya kualitas hidup manusia secara total, kemudian merambat pada munculnya kemiskinan spiritual dan budaya yang ditandai dengan sempitnya nalar, egoisme atau menang sendiri.

Khusus mengenai kehidupan masyarakat desa di Jawa Tengah, ada beberapa hasil penelitian yang dapat dijadikan sebagai data kemiskinan. Penelitian ini mengambil konsentrasi pada “seberapa besar penduduk pedesaan yang *tuna kisma*⁷ (keluarga yang tidak menguasai tanah dan dalam

⁵ Nurjaya, Masalah Jaminan Sosial di Pedesaan : Kasus Jawa, dalam *Membangun Martabat Manusia*, (Yogyakarta : Gajah Mada Press, 1996), P.660.

⁶ Musa Asy'ari, *Keluar dari Krisis Multi Dimensi*, (Yogyakarta, LESFI, 2001), P. 49.

⁷ Lihat Nurjaya, *Masalah Jaminan Sosial*, P. 656.

kehidupannya hanya menggantungkan hidupnya sebagai buruh tani. Penelitian Palmer tahun 1977, memberitahukan bahwa khusus di Jawa Tengah dan Jawa Timur sebagian besar rumah tangga petani hanya menguasai tanah pertanian yang sempit, Stambol tahun 1986, mengatakan bahwa sekitar 77 % rumah tangga petani di Jawa hanya menguasai tanah pertanian yang luasnya kurang dari 0,5 Ha. Collier tahun 1979, mengemukakan sebanyak 66,7 % rumah tangga petani di desa Parigi Kab. Serang, dan 65,37 % rumah tangga di desa Kab. Krawang ternyata tuna kisma. Utami dan Ihlawu tahun 1973 meneliti tiga desa di Kab. Klaten menemukan bahwa 40 % rumah tangga di desa Ngajat, 34 % rumah tangga di desa Kahuman, dan 43 % rumah tangga di desa Pluneng, ternyata tuna kisma.

Di Pedesaan Jawa Timur, kondisi ketakterjaminan sosial ini terlihat dari hasil penelitian berikut ini. Collier (1970) mengungkapkan bahwa 44,7% rumah tangga di desa Sungunlegowo Kab. Gresik tuna kisma. Collier (1979) menemukan sebanyak 63,2 % rumah tangga di desa Gemawang Kab. Ngawi tuna kisma. Dan masih ada hasil penelitian yang lain, yang pada dasarnya berkesimpulan masih banyaknya rumah tangga yang hidup dalam keadaan tuna kisma, sedang kehidupannya hanya mengandalkan buruh musiman.

Dari temuan-temuan di atas dapat diketahui bahwa masyarakat pedesaan, khususnya di Jawa Tengah dan Jawa Timur berada dalam kondisi yang selalu dibayang-bayangi oleh kemiskinan dan ketakjaminan sosial dalam kehidupan mereka. Terhadap problematika kemiskinan ini, pemerintah –sebenarnya- telah melakukan berbagai program yang bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan mereka. Antara lain : adanya program intensifikasi di bidang pertanian, kemudahan meminjam modal usaha, serta sistem gaduh dalam peternakan. Namun sekali lagi dikemukakan, bahwa program-program itu tidak banyak yang mengena sasaran (terwujudnya peningkatan kesejahteraan), hasil dari berbagai program tersebut sebagian besar masih dinikmati oleh orang-orang tertentu yang note benanya bukan dari masyarakat miskin pedesaan.

B. Jaminan Sosial konsep budaya pedesaan.

Sekali lagi saya ingin mengatakan bahwa jaminan sosial yang diberikan oleh pemerintah kepada masyarakat masih sebatas hanya untuk kalangan pegawai negeri, militer, polisi dan pekerja di industri saja, sementara masyarakat yang bekerja di sektor informal di perkotaan dan di sektor pertanian di pedesaan belum tersentuh oleh jaminan sosial tersebut. Namun

demikian, -kiranya masih perlu bersyukur- dengan adanya budaya masyarakat Jawa yang menjunjung tinggi jaringan kekeluargaan. Sistem kekeluargaan atau kekerabatan merupakan jaminan sosial bagi anggota masyarakat yang kehilangan pekerjaan masa lanjut usia, sakit, menderita cacat, meninggal dunia, putus hubungan kerja, bahkan sampai pada proses memperoleh jodoh, pekerjaan dan tempat tinggal⁸. Dalam masyarakat pedesaan dikenal sebagai bentuk sistem tolong menolong, gotong royong yang merupakan elemen penting dalam sistem jaminan sosial di negeri ini.

Di masyarakat Jawa misalnya kita mengenal istilah *sambat sinambat*, di Sulawesi Selatan kita mengenal adanya *assitulung-tulungeng*, di Sulawesi Utara kita mengenal adanya *mapalu*, di Ambon kita mengenal *Masohi*, dan di Bali kita mengenal *mitulungan*, jalinan yang baik antar rumah tangga ini membentuk system tolong menolong, kemudian di kenal dengan istilah gotong royong. Sistem gotong royong ini melahirkan sejumlah kewajiban yang harus diperhatikan oleh setiap anggota rumah tangga. Oleh karena itu, kendati satu sama lain berbeda asal daerah, agama, profesi, penduduk asli atau pendatang, masing-masing mempunyai kewajiban untuk mengundang manakala mempunyai hajatan : slametan, tasyakuran, kenduri atau pesta ulang tahun.

Sebut saja kampung Jomblangan Rt. 04 Banguntapan Bantul. Rumah tangga (Rt) tersebut dihuni oleh 75 keluarga; 72 keluarga beragama Islam, dan 3 beragama Kristen. Apabila salah satu dari anggota rumah tangga muslim mengadakan *kenduren* dalam tasyakuran *bayen* atau *mantenan*, maka keluarga tersebut berkewajiban mengundang semua tetangga Rt-nya tanpa membedakan satu sama lain. Dan bila ada warga yang tidak datang karena kesibukan tertentu, maka tetangga dekatnya dengan penuh kesadaran membawakan *berkat*-nya. Saling gotong royong ini tidak saja pada aspek kendurenan, namun juga pada aspek yang lain, seperti membawakan oleh-oleh makanan bagi tetangga dekatnya bila bepergian jauh, menjenguk tetangga yang sakit, mengalami kecelakaan atau meninggal dunia. Semua bantuan itu merupakan wujud jaminan sosial bagi masyarakat di pedesaan, yang hingga kini masih dipertahankan.

Dalam pandangan Mulder (1978) bahwa asas rukun merupakan keadilan yang selalu dijaga dalam hubungan sosial di dalam keluarga, di lingkungan tetangga, di desa, yang menunjukkan kemauan bersama dalam

⁸ Franz Magnis Suseno, *Etika Jawa Sebuah Analisa Filsafat tentang Kebijakan Hidup Jawa*, (Jakarta: Gramedia. 1996). P. 168.

kelompok, suka bekerja sama, saling menerima, dan kemauan bersama untuk saling membagi suka maupun duka, tolong-menolong, saling membantu satu sama lain⁹.

Nurjaya dalam penelitian tentang kerukunan di pedesaan Jawa memberikan beberapa bukti. Antara lain dalam kematian. Jika ada orang yang meninggal dunia, maka para tetangga dengan segera membantu segala persiapan penguburannya. Ada yang mempersiapkan *ubo rampe* memandikan serta mengkafaninya, ada yang membuat surat lelayu dan diumumkan di masjid-mushalla, ada yang mencari tempat pemakaman, ada yang bersih-bersih, pasang deklit dan lampu, ada yang pinjam gelas dan tikar, ada yang pesan pengeras suara, dan ada yang menyusun acara *pangrupi* jenazah, semua itu dilakukan dengan rasa spontan dan ikhlas tanpa mengharapkan sesuatu apapun dari *shahibul bait*. Fenomena kerukunan juga nampak pada bantuan dari tetangga yang berupa beras, roti, gula, premen, teh, serta uang¹⁰.

Dalam merehab rumah, membuat pagar rumah dan menebang pohon besar serta memasang konblok halaman, sangat umum minta bantuan kepada tetangganya. Sistem gotong royong seperti ini disebut dengan sambatan atau sambat-sinambat. Dalam sistem ini, keterikatan satu sama lain sangat diutamakan, dan bila saatnya nanti dimintai bantuannya, maka dengan rasa senang juga akan dibantu. Istilah yang sering digunakan adalah *gentenan*. Orang-orang yang membantu hanya diberi makanan, minuman kopi atau teh, rokok, dan makanan kecil lainnya, dan bukan berbentuk uang.

Dalam bidang pertanian, kerukunan juga nampak pada hubungan kerja antara pemilik sawah dengan petani, dimulai saat penggarapan sampai waktu panen. Seseorang yang mempunyai sawah dapat menyerahkan sawahnya tersebut diberi imbalan sejumlah padi, yang istilah jawanya adalah *bawon*. Dalam masyarakat yang masih tradisional, penggarap sawah juga sering membawa anak-anaknya pada masa panen untuk memungut sisa-sisa hasil panen yang tercecer, istilah yang digunakan adalah *ngasak*. Pola yang lain adalah penggarapan sawah dengan model *maro*, *mertelu* atau *merpat*. Dalam sistem maro, pemilik sawah dan penggarap sawah masing-masing memperoleh satu bagian dari hasil panen, tetapi semua pengeluaran menjadi tanggungan penggarap. Demikian juga dengan model

⁹ Nurjaya, *Masalah Jaminan Sosial di Pedesaan*, P.663

¹⁰ *Ibid*, P.662.

mertelu, merpat, semuanya dilakukan dengan penuh kekeluargaan dan saling membutuhkan.

Dalam model *gade*, si pemilik sawah menyerahkan sawahnya kepada seseorang untuk beberapa kali panen. Sebagai imbalannya si penggarap memberi uang terlebih dahulu kepada pemilik sawah sejumlah yang telah disepakati. Dan pada saat tempo penggarapan telah selesai, maka sawah kemudian dikembalikan kepada sipemilik sawah lagi. Model *gade* ini biasanya dilakukan pada saat pemilik sawah membutuhkan uang secara mendesak. Seperti untuk pesta perkawinan, selamatan, khitanan, biaya pengobatan, biaya sekolah atau untuk beli tanah.

Dalam hubungan antara anak (yang sudah menikah) dengan orang tuanya juga dilandasi oleh rasa yang intim. Antara lain terlihat jika rumah tangga baru belum mampu membangun rumah sendiri (*omah-omah*), maka mereka boleh tinggal bersama orang tuanya. Biasanya mereka lebih senang tinggal di rumah orang tua istri, karena seorang istri lebih *sreg* tinggal bersama orang tuanya sendiri dari pada tinggal bersama mertua. Bahkan tidak jarang orang tua memberi izin dan membantu putranya yang telah berkeluarga untuk membangun rumah di pekarangan orang tuanya, tetapi memiliki dapur sendiri. Orang tua juga sering membantu bahan-bahan pokok kepada putranya yang baru berkeluarga. Seperti beras, gula, kelapa dan sayur mayur, semua itu sebagai modal dan sekaligus jaminan sosial bagi putranya yang baru membangun rumah tangga.

Jaminan sosial bagi putra terkecil dalam keluarga jawa, biasanya diberi rumah dan pekarangan orang tuanya. Keluarga anak terkecil inilah yang nantinya diharapkan akan *menjaga*, merawat dan menunggu orang tuanya bila sudah lanjut usia dan tidak mampu lagi bekerja sendiri. Dan masih banyak jaminan sosial- jaminan sosial lain yang bisa ditemukan dalam kehidupan di pedesaan, kendati jaminan sosial tersebut di beberapa tempat telah mengalami pergeseran sebagai akibat dari kemajuan zaman.

Gejala kearah sikap meninggalkan jaminan sosial di daerah pedesaan tersebut kini telah nampak. Setidaknya dapat dilihat dari fenomena hubungan berikut ini :

Sistem *bawon* dalam pertanian, yang mencerminkan kewajiban sosial petani pemilik sawah untuk membantu petani tuna kisma, dalam jaringan keluarga, kekerabatan, tetangga, kini mulai bergeser menjadi sistem *tebasan*. Dalam sistem *tebasan* ini pemilik sawah tidak lagi memanggil tetangganya untuk bekerja pada musim panen, me'ainkan pemilik sawah menjual padinya kepada penebas di musim panen. Penebas biasanya datang dari desa luar dengan membawa tenaga kerja khusus dan sarana angkutan mobil

sendiri, untuk melakukan pekerjaan panen. Menurut survei agroekonomi pada tahun 1972 di empat desa di Jawa Tengah, ditemukan hampir 30 % petani menjual rata-rata dua pertia padinya kepada penebas, beberapa hari sebelum musim panen.

Sistem bagi hasil, dalam hubungan kerja pertanian, seperti *maro*, *mertelu*, *merpat* dan *gade*, kini telah digeser dengan sistem *sewa* tanah pertanian. Dalam sistem ini pemilik sawah menyewakan tanahnya kepada penyewa dalam jangka waktu beberapa panen. Karena alasan-alasan praktis, pemilik sawah lebih senang menerima uang kontan daripada menunggu datangnya setiap kali panen.

Pergeseran seperti ini tidak saja terjadi di dalam bidang pertanian, namun juga pada bidang-bidang lain, yang disadari atau tidak telah mengakibatkan hubungan kekeluargaan, ketetanggaan dan kekerabatan antar warga pedesaan mulai memudar. Sebagai akibatnya kepekaan terhadap tetangga berkurang dan menipisnya jaminan sosial di tengah-tengah mereka.

C. Mengenalkan ajaran Islam yang aplikatif.

Allah telah menjadikan makhluknya dengan berpasang-pasangan; ada yang laki-laki dan ada yang perempuan, ada yang pintar ada yang bodoh, ada yang senang ada yang susah, ada yang kaya dan ada yang miskin dan ada yang kuat ada yang lemah. Semua itu telah menjadi *sunnatullah* dalam ciptaan-Nya. Khusus dalam hal kondisi umat yang kuat dan yang lemah, Rasul Muhammad bersabda 'Orang mukmin yang kuat itu lebih baik dan lebih dicintai oleh Allah dari pada orang mukmin yang lemah'. Ini mengandung arti bahwa Allah menciptakan hamba-Nya ada yang kuat dan ada yang lemah, namun Allah tidak menentukan siapa yang akan menjadi kuat dan siap yang menjadi lemah. Kuat dan lemah suatu amat sangat tergantung bagaimana umat manusia tersebut memanfaatkan potensi yang telah diberikan oleh Allah kepada umat manusia. Dalam firman-Nya Allah mengatakan 'Allah sekali-kali tidak akan mengubah nasib suatu kaum, kecuali kaum itu mengubah nasibnya sendiri'¹¹. Pada ayat yang lain juga dinyatakan 'yang demikian itu, sesungguhnya Allah tidak akan mengubah kenikmatan suatu kaum, kecuali kaum itu mau mengubah dirinya sendiri'¹².

¹¹ QS, *Al-Ra'adu*, 11

¹² QS, *Al-Anfal*, 53.

Berdasarkan pada konsep agama tentang kehidupan tersebut, semestinya budaya etos kerja Islami harus digalakkan di tengah-tengah kehidupan masyarakatnya. Etos kerja dalam Islam selalu berhubungan dengan nilai kejiwaan seseorang¹³. Maksudnya hendaklah setiap pribadi muslim mengisi waktu-waktu hidupnya dengan kebiasaan-kebiasaan yang positif dan ada semacam kerinduan untuk menunjukkan kepribadiannya sebagai seorang muslim dalam bentuk hasil kerja serta sikap dan perilaku yang menuju atau mengarah pada hasil yang sempurna.

Untuk mengubah masyarakat miskin menuju pada masyarakat yang berkecukupan, nampaknya harus dimulai dari pemahaman terhadap agama dengan perspektif yang baru. Terminologi orang saleh umpamanya tidak harus dimaknai sebagai orang yang bekerja tanpa pamrih, atau orang yang hanya menghabiskan waktunya untuk beribadah dalam arti yang sempit. Orang saleh harus dimaknai dengan orang yang menempatkan doa pada posisi seimbang dengan karya. Dengan kata lain, kesalehan hendaklah diletakkan pada keaktifan praktis bukan dalam kepasifan doa¹⁴. Pemahaman terhadap agama sebagaimana tersebut di atas, tentu harus diikuti dengan pembinaan secara rutin dan terarah. Bila kedua hal tersebut berjalan seimbang –cepat atau lambat- kesejahteraan hari ini –Insya Allah- akan lebih baik daripada hari kemarin, dan hari besuk akan lebih baik daripada hari ini.

Kemudian mengenai jaminan sosial, dalam masyarakat Islam dikenal adanya institusi yang mempunyai fungsi sebagai elemen penting dalam jaminan sosial yaitu *zakat*. Ada beberapa amalan –sebagai jaminan sosial- terhadap kaum fakir miskin, antara lain : *zakat mal*, *zakat fitrah*, menyembelih hewan qurban, dan *shadaqah*. Zakat atau yang semakna dengan itu dikumpulkan oleh *baitul-mal*, kemudian didistribusikan kepada orang yang berhak menerimanya. Sayangnya, pengumpulan zakat di kalangan umat beragama ini belum dilakukan secara sungguh-sungguh dan menyeluruh. Sedemikian halnya hingga menjadikan hasilnya pun juga tidak maksimal.

¹³ Toto Tasmara, *Membudayakan Etos Kerja Islami*, (Jakarta Gema Islami, 2002), P.16

¹⁴ Lihat Ahmad Sobary, *Kesalehan, Etos Kerja dan Tingkah Laku Ekonomi, Studi Kasus Sektor Informal di Ciater*, Dalam *Membangun martabat Manusia*, (Yogyakarta: Gadjahmada Press, 1996). P.595-596.

D. Kebijakan ekonomi yang tepat.

Untuk mengatasi persoalan kemiskinan ini, Musa Asy'ari menawarkan pemikiran yang sangat operasional, yaitu *pemberdayaan industri kecil*¹⁵. Dalam pandangan Asy'ari, dipilihnya pemberdayaan industri kecil sebagai usaha mengatasi krisis antara lain beralasan : (1) ternyata industri kecil lebih dapat bertahan menghadapi krisis ekonomi, (2) industri kecil lebih mudah menyesuaikan dengan perubahan, (3) dapat mengatasi problem pengangguran yang maik besar, (4) industri kecil lebih dapat menjamin pemerataan ekonomi, (5) menjadi tempat yang subur dalam menanamkan jiwa usahawan sejati, yang dalam istilah Asy'ari dengan *entreneurship*.

Dengan merujuk pengalaman YDBA (Yayasan Dharma Bhakti Astra) yang telah lama berkecimpung dalam Industri Kecil dan Menengah (IKM), Asy'ari mengemukakan beberapa persoalan yang dihadapi IKM. Antara lain persoalan : keterbatasan dalam akses pasar, sumber-sumber pembeayaan dan permodalan, penguasaan teknologi dan informasi, keterbatasan dalam organisasi dan manajemen, serta persoalan jaringan usaha dan kemitraan.

Dalam mengatasi hal tersebut, Asy'ari menawarkan tiga model pendekatan :

Pertama, pendekatan cultural. Pendekatan ini lebih menitik beratkan pada perubahan sikap hidup pelaku usaha. Persoalan yang bersifat cultural sangat berhubungan erat dengan sistem nilai budaya yang telah membentuk kepribadian pelaku industri sejak bertahun-tahun lamanya. Sistem nilai budaya ini kemudian mempengaruhi jalan hidup dan kebijakannya, termasuk dalam dunia usaha. Seperti cara menjalankan usaha, cara bekerja, cara menghadapi mitra bisnisnya, cara menangani karyawan, cara mengelola uang, cara menggunakan keuntungan, cara menghadapi pesaing, cara mengatasi krisis yang muncul. Supaya mereka dapat lepas dari kultur lamanya (*agraris*) pindah ke kultur industri, adalah dengan mengajak mereka keluar -untuk sementara- dari kultur agraris yang melingkupinya, melalui wisata industri dan wisata pasar.

Kedua, pendekatan struktural. Pendekatan ini berkaitan dengan kebijakan. Seperti masalah permodalan, penguasaan teknologi, penataan pengelolaan organisasi yang lebih efektif, penyediaan bahan baku, perluasan pasar, serta kemampuan mengakses informasi global. Dalam skala prioritas, persoalan yang harus dipecahkan adalah persoalan pasar modal,

¹⁵ Musa Asy'ari, *Keluar dari Krisis Multi Dimensi*, P.123-139

peningkatan penguasaan teknologi, permodalan, penataan manajemen, dan perluasan jaringan.

Ketiga, pendekatan jaringan. Pendekatan ini berkaitan dengan pengadaan bahan baku industri, lembaga keuangan, perusahaan-perusahaan yang menggunakan produknya, serta lembaga-lembaga yang dapat memberikan pembinaan dan pemberdayaan industri kecil, baik pemerintah, swasta maupun luar negeri. Pendekatan ini dinilai sangat penting, terutama dalam usahanya mempercepat pengembangan industri kecil dan usahanya membuka peluang bisnis. Dalam pandangan Asy'ari, pembangunan yang ideal adalah menempatkan industri kecil sebagai *sub-constructing* dari industri besar, untuk memperkokoh struktur industri nasional¹⁶.

V. Kesimpulan

Berdasar pada uraian tersebut di atas, kiranya dapat diambil kesimpulan sebagai berikut :*Pertama* : persoalan kemiskinan adalah persoalan kehidupan umat manusia, keberadaannya telah menjadi bagian dari takdir Tuhan. Namun manusia sendiri yang menentukan pada posisi mana ia berada.

Kedua : kemiskinan sering disebabkan oleh faktor kultural dan struktural, oleh karenanya analisisnyapun hendaklah melalui pendekatan kultural dan struktural.*Ketiga* : salah satu cara mengatasi kemiskinan sebagai akibat dari krisis ekonomi adalah dengan menggunakan beberapa pendekatan, antara lain pendekatan sosial, agama dan kebijakan.

Daftar Pustaka

- Ahmad Sobary, Kesalehan, Etos Kerja dan Tingkah Laku Ekonomi, Studi Kasus Sektor Informal di Ciater. Dalam *Membangun martabat Manusia*, Yogyakarta: Gadjahmada Press, 1996.
- Ellis, *The Dimensions of Poverty*, dalam Sunyoto Usman, *Pembangunan dan Pemberdayaan Masyarakat*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2006.
- Franz Magnis Suseno, *Etika Jawa, Sebuah Analisa Filsafat tentang Kebijaksanaan Hidup Jawa*, Jakarta: Gramedia, 1996.
- Musa Asy'ari, *Keluar dari Krisis Multi Dimensi*, Yogyakarta: LESFI, 2001.

¹⁶ Asy'ari, *Ibid*, P.127

Nurjaya, Masalah Jaminan Sosial di Pedesaan : Kasus Jawa, dalam *Membangun Martabat Manusia*, Yogyakarta : Gadjah Mada Press, 1996.

Purwodarminto, *Kamus Umum Bahasa Indonesia*, Pusat Pembinaan dan Pengembangan Bahasa Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, Balai Pustaka, 1985.

Peter Townsed, *The Concept of Poverty*, London Heinemann 1970 lewat tulisan Sunyoto Usman, *Pembangunan dan Pemberdayaan Masyarakat*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2002.

QS, *Al-Ra'du*, 11.

QS, *Al-Anfal*, 53.

Toto Tasmara, *Membudayakan Etos Kerja Islami*, Jakarta: Gema Islami, 2002.

Drs. H. Mardjoko Idris, M.Ag. Dosen Fakultas Adab UIN Sunan Kalijaga, sekarang menjabat kepala PPM LPM UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta.